Perpindahan Karena Perluasan: Masuknya Mangasa dalam Wilayah Kota Makassar 1971

by M Rasyid Ridha

Submission date: 18-Aug-2022 04:19PM (UTC+0700)
Submission ID: 1883885217
File name: 9006-20957-1-PB.pdf (79.51K)
Word count: 3392
Character count: 21836

JURNAL PATTINGALLOANG
©Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

Perpindahan Karena Perluasan: Masuknya Mangasa dalam Wilayah Kota Makassar 1971

Akhmad Akbar Abdullah, Muhammad Saleh Madjid, M. Rasyid Ridha
Program Studi Sejarah Pendidikan Sejarah FIS UNM
akhmadakbara@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini berupaya menjelaskan proses perluasan Kotamadya Makassar dari persiapan hingga terjadinya perluasan Kotamadya Makassar sehingga membuat Mangasa yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Gowa berpindah ke dalam bagian wilayah administratif Kotamadya Makassar, perkembangan Kelurahan Mangasa setelah masuk dalam wilayah administratif Kota Makassar serta kehidupan sosial ekonomi yang terdapat di Kelurahan Mangasa. Berpindahnya daerah Mangasa ke dalam wilayah administratif Kota Makassar yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Gowa disebabkan karena adanya perluasan Kota Makassar pada tahun 1971. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan penelitian historis (*Historical Research*), yang terdiri atas beberapa tahapan yakni: (1) Heuristik, dengan mengumpulkan arsip terkait data-data perluasan Kotamadya Makassar dari Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan buku-buku maupun karya tulis ilmiah yang terkait dengan Kotamadya Makassar dan Mangasa. (2) Kritik atau proses verifikasi keaslian sumber sejarah. (3) Interpretasi atau penafsiran sumber sejarah, dan (4) Historiografi, yakni tahap penulisan sejarah.

Kata Kunci : Perluasan, Makassar, Mangasa

Abstract

This simple work attempts to explain the process of expanding the Municipality of Makassar from preparation to the expansion of the Municipality of Makassar so that Mangasa which was previously part of Gowa Regency moved into the administrative area of Makassar Municipality, the development of Mangasa Village after being included in the administrative area of Makassar City and socio-economic life which is found in Mangasa Village. The transfer of the Mangasa area into the administrative area of Makassar City which was previously part of the territory of Gowa Regency was due to the expansion of Makassar City in 1971. This research was a research with historical research approach, consisting of several stages, namely: (1) Heuristics, by collecting archives related to data on the expansion of the Municipality of Makassar from the Archives and Regional Library of South Sulawesi Province and books and scientific papers related to the Municipality of Makassar and Mangasa. (2) Criticism or the process of verifying the authenticity of historical sources. (3) Interpretation or interpretation of historical sources, and (4) Historiography, namely the stage of historical writing.

Keywords: Expansion, Makassar, Mangasa

A. Pendahuluan

Daerah perkotaan merupakan wadah konsentrasi pemukiman penduduk dari berbagai kegiatan ekonomi dan sosial serta mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkemba-ngan penduduk kota di negara sedang berkembang tidak saja mencerminkan pertambahan alami penduduk kota, tetapi juga pertambahan arus penduduk dari desa ke kota cukup besar. (Wati, 2016)

Kota Makassar adalah Ibu kota Sulawesi Selatan yang merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur. Pada masa lampau pernah menjadi ibu kota Negara Indonesia Timur. Makassar terletak di pesisir barat daya pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan. (Wikipedia, 2018)

Melihat kondisi dari Kota Makassar sebagai tujuan utama dari urbanisasi. penduduk yang ada di kawasan Indonesia Timur, sehingga peningkatan jumlah penduduk di kota ini meningkat dengan pesat. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka pemerintah Kota Makassar mau tidak mau harus melakukan perluasan ruang perkotaan karena jumlah penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat di Kota Makassar ini. Olehnya itu, Pemerintah Kota Makassar harus mengambil sebagian wilayah dari daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar untuk memperluas wilayah tata ruang Kota Makassar. (Amran, 2015)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian sejarah dengan menggunakan metode yang sesuai dengan kaidah keilmuan sejarah, sebagaimana berikut

1. Heuristik

Tahap pertama dalam penelitian sejarah berupa pengumpulan sumber-sumber yang dikenal dengan istilah Heuristik. Heuristik artinya mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang terkait dengan topik yang akan di kaji, yakni "Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar 1971-2017".

2. Kritik Sumber

Kritik sumber merupakan bagian menafsiran dan pengkajian sumber. Proses yang menilai apakah sumber itu memiliki kredibilitas (kebiasaan untuk dipercaya) atau tidak. (Priyadi, 2012)

3. Interpretasi

Pada tahap ketiga peneliti harus menafsirkan data-data yang telah diperoleh. Proses menafsirkan memerlukan ketelitian dari seorang penulis untuk memilah data mana yang penting untuk tema penelitian dan data mana yang tidak berkaitan dengan penelitian.

4. Historiografi

Dalam kaitannya dengan historiografi, yaitu proses penulisan sejarah banyak aspek yang terkait di dalamnya. Menurut Hexter, proses pengumpulan bukti bukti sejarah, pengeditan sumber sejarah, penggunaan pemikiran dan imajinasi sejarah, dan sebagainya merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari historiografi. (Haryono, 1995)

C. Tinjauan Penelitian

Mengetahui keadaan geografis suatu wilayah yang telah dijadikan objek penelitian sangatlah penting. Mempelajari lokasi berlangsungnya suatu peristiwa merupakan keharusan bagi seseorang yang telah mengungkapkan sejarah di suatu daerah. Sebagaimana diungkapkan Tamburaka bahwa peranan sejarah ditentukan oleh faktor-faktor geografis, sehingga dapat dikatakan bahwa bumi tidak ada, sudah tentu tidak ada sejarahnya. (Rustam, 1999)

1. Keadaan Geografis

Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia bagian timur dan sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Makassar memiliki batas-batas sebagai berikut:

a. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
b. Bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
c. Bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar
d. Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Maros.

Luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km². Kota Makassar merupakan dataran rendah dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter di atas permukaan laut. Kota Makassar secara administratif memiliki 15 kecamatan. (Badan Pusat Statistik, 2017)

Kemamatan Tamalate merupakan salah satu kecamatan terluas di Kota Makassar dengan luas wilayah tercatat 20,21 km² dengan presentase 11,50% dari total luas wilayah Kota Makassar. Adapun batas-batas Kecamatan Tamalate yakni:

a. Sebelah utara dengan Kecamatan Mamajang
b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar
d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar

Berdasarkan batas-batas wilayah tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan Tamalate merupakan daerah perbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar. Selain itu Kecamatan Tamalate memiliki bagian daerah pantai yang berbatasan dengan Selat Makassar. (Badan Pusat Statistik, 2017)

Kelurahan Mangasa merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Tamalate. Luas wilayah Kelurahan Mangasa tercatat 2,03 km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Mannuruki
b. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Gunungsari Kecamatan Rappocini
c. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Gunungsari Kecamatan Rappocini
d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa

Setelah Mangasa masuk dalam wilayah Kota Makassar, Mangasa berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa di bagian selatan Kota Makassar. (Kantor Lurah Mangasa, 2008)

2. Keadaan Topografi dan Klimatologi

Kelurahan Mangasa merupakan salah satu daerah di Kecamatan Tamalate yang tidak termasuk daerah pantai dengan topografi di bawah 500 meter dari permukaan laut. Hal ini menandakan Mangasa pada masa awal bergabung dengan Makassar memiliki topografi berbentuk rawa-rawa dan beberapa daerah persawahan. (Badan Pusat Statistik, 2017)

Pola iklim pada Kelurahan Mangasa sama dengan iklim yang ada pada daerah-daerah yang terdapat di Kota Makassar yang dikenal dengan dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya berlangsung dari bulan November hingga April, sedangkan musim kemarau dimulai dari bulan Mei hingga Oktober.

Temperatur udara di Kelurahan Mangasa rata-rata setiap harinya sekitar 33°C dengan rata-rata kelembapan udara 80% dan curah hujan sekitar 198 mm. Curah hujan terbesar terjadi pada awal tahun dan akhir tahun, sedangkan penyinaran matahari terbesar terjadi pada pertengahan tahun. (Kantor Lurah Mangasa, 2008)

D. Pembahasan

1. Persiapan Perluasan Wilayah Kotamadya Makassar

Permasalahan yang dialami oleh kota besar seringkali menimbulkan berbagai macam problematika yang mendalam terhadap pemerintahan kota itu sendiri, hal ini

dikarenakan proses urbanisasi yang begitu besar sehingga mengakibatkan terjadinya lonjakan atau kepadatan penduduk. Dilain sisi masalah lainpun beriringan muncul sehingga menimbulkan masalah yang baru untuk wilayah perkotaan khususnya kota-kota besar. (Amran., 2015)

Proses urbanisasi yang terjadi di Kotamadya Makassar berdampak pada penambahan penduduk yang sangat pesat. Maka dalam hal ini untuk menampung perkembangan penduduk yang terjadi di Kotamadya Makassar, maka diperlukan perluasan wilayah kota. Selain karena hal penambahan penduduk yang sangat pesat, perluasan Kotamadya Makassar juga diperlukan agar pembangunan infrastruktur sebagai Ibu Kota Provinsi bisa berjalan.

Dengan demikian terdapat perubahan klarifikasi tentang "perubahan wilayah atau penyempurnaan batas wilayah" yang semula harus ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 penetapannya diubah dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 1965, sehingga terdapat penyederhanaan tentang tata cara melakukan perluasan kota.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tata cara melakukan perluasan kota ditempuh jalan sebagai berikut :

a. *Planning* atau Perencanaan

Unsur ini dibawa naungan Departemen Dalam Negeri di mana terdapat Dinas Tata Kota Direktorat Pemerintah Daerah Dirjen PUOD, yang mengolah perencanaan dan pembuatan Peraturan Pemerintah yang dikehendaki oleh pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Dinas Tata Kota dalam perencanaan tersebut menghendaki proses yang sudah jadi dari Daerah Tingkat I berupa :

1) Keputusan DPRD tingkat II yang menerima perluasan
2) Keputusan Pemerintah Daerah Tingkat II yang menerima perluasan
3) Keputusan DPRD Tingkat II yang menghendaki pelepasan sebagian wilayahnya.
4) Keputusan Pemerintah Daerah Tingkat II yang menghendaki pelepasan sebagian wilayahnya.

Apabila persyaratan ini telah disampaikan kepada Dinas Tata Kota maka rencana tersebut diserahkan kepada Departemen PUTL (Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik) untuk penetapan perancangan (Designing).

b. *Designing* atau Perancangan

Unsur ini dibawa naungan Departemen PUTL di mana terdapat Dinas Tata Kota dan Daerah Direktorat Tata Kota dan Daerah Dirjen Ciptakarya yang mengolah secara teknis dan membuat perancangan (*designing*).

1) *Outline plan* (rencana jangka panjang)
2) *Master plan* (rencana induk) sebagai yang utama dari sesuatu rencana
3) *Detail plan* (rencana detail) sebagai yang utama dari sesuatu rencana

Apabila perencanaan (*planning*) dari Departemen Dalam Negeri dan perencanaan (*Designing*) dari Departemen PUTL telah selesai maka Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada Presiden rencana Peraturan Pemerintah tentang perluasan Kota untuk ditandatangani dan selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Negara.

Atas uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rangkaian proses perluasan Kota Makassar akan seluruhnya selesai apabila DPRD Gowa dan Pemerintah Daerah Gowa mengeluarkan pendapat tentang kesediaannya memberikan sebagian wilayahnya ke Kotamadya Makassar. Adapun kronologi perkembangan perluasan Kotamadya Makassar diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 1962

Pada tahun ini, tepatnya pada 29 November DPRD Kotapradja Makassar mengeluarkan surat keputusan tentang pelaksanaan *town planning* dalam rangka perkembangan Kotapradja Makassar. Berlanjut pada tanggal 5 Desember diadakan pertemuan antara Pemerintah Kotapradja

Makassar dengan Pemerintah Gowa yang bertempat di Balai Kota untuk mencari jalan keluar dari kesulitan perkembangan kota. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh M. Dg. Patompo selaku dari pimpinan dari Makassar, Mahdi Madatung, SH selaku pimpinan dari Gowa dan juga A. Pangerang Petta Rani dan A. Burhanuddin. Hingga pada akhir tahun 1962 tepatnya pada tanggal 30-31 Desember dilakukan pembentukan tim Kotapradja Makassar dengan Daerah Tingkat II Gowa dan sekaligus mengadakan musyawarah di Malino untuk merumuskan suatu piagam kerja sama.

2. Tahun 1963

Pada tanggal 5 Januari DPRD Gowa menyetujui Piagam Kerja Sama lalu pada tanggal 22 Januari diadakan sidang DPRD Makassar dan menyetujui Piagam Kerja Sama, adapun pembicaraan-pembicaraan dalam sidang tersebut sebagai berikut:

a. Perumahan Pegawai Gubernur di Gunung Sari
b. Lebih 10 tahun yang lalu telah diadakan pembicaraan tentang hal ini, akan tetapi Pemerintah Gowa menolak saat itu
c. Daerah kerja sama tersebut agar diberi nama Ujung Pandang Bebas
d. Pelopor perkembangan oleh M. Dg. Patompo
e. Masalah pelaksanaan ini adalah realisasi dari konperensi para Kepala Daerah Sulawesi Selatan Tenggara di Raha

Pada tanggal 19 Maret 1963 barulah penandatanganan Piagam Kerja Sama antara Pemerintah Gowa dan Pemerintah Makassar.

3. Tahun 1966

Sebagai realisasi dari Piagam kerja sama tersebut, maka dilakukanlah kegiatan survei Perencanaan Pembangunan Kota Makassar yang dilakukan oleh satu tim.

4. Tahun 1967

Pada tanggal 7 Juli 1967 terdapat persetujuan DPRD Kotamadya Makassar tentang usul rencana perluasan Makassar sebagai Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan.

5. Tahun 1968

Pada tahun ini terdapat beberapa peristiwa terkait perkembangan perluasan Kotamadya Makassar. Adapun uraian peristiwa sebagai berikut:

a. 31 Januari : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang pembentukan Tim Penyelesaian Persengketaan Perbatasan Daerah yang diketahui oleh Drs. J. Salusu (B.P.H. Pemerintahan).
b. 16 Maret : Surat Menteri Dalam Negeri No. Pemda 2/1/19 tentang syarat-syarat mengenai tanah yang akan dijadikan objek perluasan kota kepada Gubernur Sulawesi Selatan.
c. 21 Maret : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang penyempurnaan/pembaharuan tim penyelesaian sengketa perbatasan daerah dalam wilayah Sulawesi Selatan.
d. 7 April : keputusan rapat Kepala Desa se-Kecamatan Tamalate Gowa tentang pemisahan sebagian wilayah Kabupaten Gowa untuk dimaksudkan ke dalam wilayah Kotamadya Makassar dalam rangka perluasan ibu kota.
e. 2 Mei : Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sulawesi Selatan No. Pemda 2/1/29 tentang usul perluasan wilayah Kotamadya Makassar.
f. 10 Mei : surat Gubernur Sulawesi Selatan kepada Pemda Makassar untuk diadakan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas kemungkinan pemberian ganti kerugian kepada Pemda Gowa.
g. 5 Juni : Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar untuk mendengarkan penjelasan Tim Penyelesaian sengketa Perbatasan Daerah Makassar dengan Gowa.
h. 7 Juni : Surat Keputusan Walikota Makassar No.152/A/VI/68 tentang persiapan pengurangan tanah yang akan diserahkan Gowa dengan bekerja sama antara P.U. Kotamadya Makassar dengan Gowa.
i. 11 Juni : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Makassar

No.16/I/3/DPRD tentang memperkuat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Makassar tertanggal 22 Januari 1963 No.1/DPRD.

j. 11 Juli : Penunjukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Makassar untuk duduk dalam Tim perluasan kota.
k. 25 Juli : Surat Gubernur Sulawesi Selatan kepada Pemda Makassar tentang pengiriman bahan-bahan, risalah/notulen rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Makassar tentang perluasan kota.

6. Tahun 1969

Pada tanggal 28 Juli 1969 Pemerintah Kabupaten Gowa mengeluarkan surat tentang:

a. Pembangunan Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan dengan ketentuan tidak mengurangi status batas wilayah Kabupaten Gowa sesuai UU.29/1959
b. Menguatkan Program Kerja sama Pemerintah dengan Makassar pada tanggal 19 Maret 1953.

7. Tahun 1970

Pada tanggal 28 Februari 1970 dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 60/II/70 tentang Pembentukan Panitia Kerja dalam realisasi Perluasan Ibu Kota Propinsi dengan susunan sebagai berikut :

Penasehat :
1) Ketua/Agt. Muspida Sul-Sel
2) A. Pangerang Petta Rani
3) Drs. H.I.M. Salman
Ketua : Drs. M. Daud Nompo
Wakil Ketua : Drs. M. Parawangsa
Sekretaris : Drs. Pattajora
Anggota :
Drs. Kamisij G.A.
Drs Alimuddin
Ir. Lateko Tjambolang
A.M. Arsjad
Drs. Darnuju
Ir. Sjamsuddin Abbas
Pembagian Kerja :
Unit I. Perluasan Wilayah capai kata mufakat
Unit II. Menentukan batas perencanaan Ibu Kota Propinsi berdasarkan kebutuhan 25-30 tahun.

Panitia kerja ini telah selesai melaksanakan tugasnya dan dilanjutkan dengan melapor kepada Gubernur Sulawesi Selatan, selanjutnya oleh Gubernur Sulawesi Selatan mengirim surat sebagai hasil kerja panitia tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. (Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang, 1972)

2. Perubahan Status Administratif Mangasa

Pada Tahun 1957 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U.P/7/2/24 tanggal 6 Februari 1957, Daerah Tingkat II Kabupaten Gowa terdiri dari 12 daerah bawahan Distrik yang di bagi dalam 4 lingkungan kerja pemerintahan yang disebut koordinator diantaranya:

a. Lingkungan Gowa Utara, meliputi Distrik Mangasa, Tombolo, Pattalassang, Borongloe, Manuju dan Borisallo. Koordinatornya berkedudukan di Sungguminasa.
b. Lingkungan Gowa Timur, meliputi Distrik Parigi, Inklusif Malino Kota dan Tombolopao, Koordinatornya berkedudukan di malino.
c. Lingkungan Gowa selatan, meliputi Distrik Limbung dan Bontonompo, koordinatornya berkedudukan di Limbung.
d. Lingkungan Gowa Tenggara, meliputi Distrik Malakaji, Koordinatornya berkedudukan di Malakaji. (Pemerintah Kabupaten Gowa, 2018)

Berdasarkan pembagian lingkungan Daerah Tingkat II Kabupaten Gowa di atas, maka Mangasa yang berstatus Distrik bersama dengan Tombolo, Pattalassang, Borongloe, Manuju dan Borisallo termasuk dalam wilayah Lingkungan Gowa Utara yang Koordinatornya berkedudukan di Sungguminasa.

Pada tahun 1960 berdasarkan Kebijakan Pemerintah Pusat di seluruh wilayah Republik Indonesia diakan Reorganisasi Distrik

menjadi Kecamatan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No.2067/1961 tanggal 18 Desember 1961 yang menyatakan semua distrik berubah nama menjadi kecamatan. Kabupaten Tingkat II Gowa yang terdiri dari 12 Distrik diubah menjadi 8 kecamatan, masing-masing:

a. Kecamatan Tamalate dari Distrik Mangasa dan Tombolo.
b. Kecamatan Panakkukang dari Distrik Pattalassang.
c. Kecamatan Bajeng dari Distrik Limbung.
d. Kecamatan Pallangga dari Distrik Limbung .
e. Kecamatan Bontonompo dari Distrik Bontonompo.
f. Kecamatan Tinggimoncong dari Distrik Parigi dan Tombolopao.
g. Kecamatan Tompobulu dari Distrik Malakaji.
h. Kecamatan Bontomarannu dari Distrik Borongloe, Manuju dan Borisallo.

Dengan adanya perubahan distrik menjadi kecamatan tersebut, maka dapat diketahui bahwa Distrik Mangasa dan Tombolo yang sebelumnya masuk dalam wilayah Lingkungan Gowa Utara diubah menjadi Kecamatan Tamalate. Berdasarkan perubahan tersebut maka Mangasa termasuk dalam wilayah Kecamatan Tamalate Kabupaten Gowa.

Setelah melalui beberapa persiapan perluasan Kotamadya Makassar sebagai Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan pada pembahasan sebelumnya maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang "Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene Dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan" yang ditetapkan pada tanggal 1 September 1971 memutuskan Daerah Kotamadya Makassar diperluas dengan memasukkan sebagian daerah (RI, 1971) dari :

1. Kabupaten Gowa yang meliputi desa:
   a. Barombong
   b. Karuwisi
   c. Panaikang
   d. Tello Baru
   e. Antang
   f. Tamangappa
   g. Jongaya
   h. Rappocini
   i. Maccini Sombala
   j. Mangasa
2. Kabupaten Maros yang meliputi desa :
   a. Bira
   b. Daya
   c. Tamalanrea
   d. Bulurokeng
   e. Sudiang
3. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi desa :
   a. Barrang Cadi
   b. Barrang Lompo
   c. Perjuangan/Kodingareng

Berdasarkan keputusan tersebut maka daerah Mangasa masuk dalam wilayah Kotamadya Makassar sebelumnya berada pada wilayah Kabupaten Gowa. Mangasa beserta Rappocini, Jongaya, Maccini Sombala dan Barombong masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Tamalate dengan status Lingkungan.

E. Kesimpulan

Mangasa sebelum tahun 1971 merupakan daerah yang masuk dalam wilayah Kabupaten Gowa. Dengan banyaknya penduduk yang melakukan urbanisasi ke Kotamadya Makassar sehingga luas wilayah kota ini tidak bisa lagi menampung jumlah penduduk yang bermukim di wilayah Kotamadya Makassar. Maka diadakan persiapan perluasan Kotamadya Makassar. Setelah beberapa tahap dan persiapan yang telah dilakukan pemerintahan kota maka pada tahun 1971 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene

Dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan" yang ditetapkan pada tanggal 1 September 1971 memutuskan Daerah Kotamadya Makassar diperluas dengan memasukkan beberapa daerah dari Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene Dan Kepulauan. Mangasa yang sebelumnya masuk dalam wilayah Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah yang dimasukkan dalam perluasan wilayah Kotamadya Makassar. Selain mengenai perluasan Kotamadya Makassar, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 juga menetapkan perubahan nama Kotamadya Makassar menjadi Kotamadya Ujung Pandang.

DAFTAR PUSTAKA

Amran, Muh. 2015. *Ujung Pandang: Kajian Sejarah Perluasan Ruang Kota Makassar 1965- 1998. Skripsi.* Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Badan Pusat Statistik. 2017. *Kecamatan Tamalate Dalam Angka Tahun 2017.* Makassar: Badan Pusat Statistik Kota Makassar.

Badan Pusat Statistik. 2017. *Kota Makassar Dalam Angka Tahun 2017.* Makassar. Badan Pusat Statistik Kota Makassar.

Pemerintahan Kabupaten Gowa. *Profil Pemerintah Kabupaten Gowa.* www.gowakab.go.id/profile. *Internet.* Diakses pada 30 Agustus 2018.

Pemerintahan Kotamadya Ujung Pandang (1926-1988). *Walikota Kepala Daerah Makassar: Surat-Surat tanggal 30 Juli 1966 – 2 November 1972 Tentang Masalah Perluasan Wilayah Kotamadya Makassar.* Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan.

Haryono. 1995. *Mempelajari Sejarah Secara Efektif.* Malang: Pustaka Jaya.

Priyadi, Sugeng. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah.* Yogyakarta: Ombak.

Republik Indonesia. 1971. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene Dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Lembar Negara Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara.

Tahir, Miftahul Khaer. 2017. *Kelurahan Pakkabata (1981-2015) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Skripsi.* Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

Wati, Fitra Widya. 2016. *Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar 1970-2013 (Suatu Kajian Sejarah Sosial). Skripsi.* Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Wikipedia. *Kota Makassar.* https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar. Diakses pada tanggal 16 Februari 2018.

Perpindahan Karena Perluasan: Masuknya Mangasa dalam Wilayah Kota Makassar 1971

ORIGINALITY REPORT

16%	14%	9%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	lib.unnes.ac.id Internet Source	2%
2	MITHEN LULLULANGI UNM, Onesimus Sampebua. "TONGKONAN KE'TE' KESU' AS A TRADITIONAL ARCHITECTURAL TOURIST ATTRACTION IN TANA TORAJA", Journal of Building Material Science, 2021 Publication	2%
3	foredimurah.com Internet Source	1%
4	ejournal.ipdn.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
6	sulsel.go.id Internet Source	1%
7	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%

8	semnas.big.go.id Internet Source	1 %
9	www.dokternana.com Internet Source	1 %
10	bolanoyarmin.blogspot.com Internet Source	1 %
11	perkotaan.bpiw.pu.go.id Internet Source	1 %
12	andionei.blogspot.com Internet Source	1 %
13	cepatcargo.id Internet Source	1 %
14	liadjumadi.blogspot.com Internet Source	1 %
15	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
16	www.indonesiahistory.id Internet Source	<1 %
17	rorofattahusarah.wordpress.com Internet Source	<1 %
18	ojs.fkip.ummetro.ac.id Internet Source	<1 %
19	pasca-umi.ac.id Internet Source	<1 %

20	catalogue.nla.gov.au Internet Source	<1 %
21	jdih.blitarkab.go.id Internet Source	<1 %
22	repository.its.ac.id Internet Source	<1 %
23	Febriana Khoiriyah, Ardian Fahri, Bimo Bramantio, Sumargono Sumargono. "Sejarah Toponimi Daerah Transmigrasi Provinsi Lampung Melalui Tuturan Tradisi Lisan", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2019 Publication	<1 %
24	Ling Ling Susanti, Yusma Damayanti, Dewi Sri Nurchaini. "ANALISIS KONSUMSI PANGAN RUMAH TANGGA PETANI KARET DI KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN BATANGHARI", Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis, 2012 Publication	<1 %
25	idoc.pub Internet Source	<1 %
26	umbujoka.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	Mohd Fikri Azhari. "DEVELOPMENT OF THE ARABIC-INDONESIAN DICTIONARY AND	<1 %

INDONESIAN-ARABIC DICTIONARY (HISTORICAL AND SYSTEMATIC STUDY IN INDONESIA)", AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan, 2020

Publication

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1 words
Exclude bibliography	On		